

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki potensi tambang, baik mineral batubara atau minyak dan gas bumi yang tersebar di berbagai daerah, sehingga sektor tambang merupakan sektor andalan Pemerintah Indonesia sebagai sumber devisa negara. Selain sebagai sumber devisa Negara ataupun pendapatan asli daerah (PAD) daerah, sektor tambang juga berperan sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat. Keberadaan kegiatan pertambangan tersebut memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk terbukanya lapangan kerja, antara lain sebagai buruh pengangkut bahan tambang. Di samping itu, masyarakat juga berkesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi melalui sejumlah usaha seperti warung makan, toko kelontong ataupun jasa cuci kendaraan.

Usaha pertambangan menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara (MINERBA) adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Pertambangan di Indonesia sendiri meliputi Migas dan Minerba. Migas telah menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar untuk Negara. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan

realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari industri migas pada tahun 2018 mencapai Rp58,75 triliun atau 73,12% dari target APBN 2018.¹ Tidak hanya sektor migas saja, sejumlah daerah di Indonesia juga kaya akan hasil tambang berupa mineral dan batu bara. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (MINERBA), pertambangan mineral dibagi atas 4 (empat) golongan, yaitu pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan. Definisi batuan sendiri adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*).²

Selain berkontribusi terhadap devisa negara ataupun PAD daerah, sektor tambang juga memberikan banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Disamping sisi positif tersebut, pertambangan juga menimbulkan dampak negatif, yaitu antara lain persoalan lingkungan yang berupa pencemaran ataupun kerusakan lingkungan, seperti kerusakan lahan bekas tambang, pencemaran meliputi udara berupa debu yang ditimbulkan, pencemaran suara meliputi kebisingan alat alat yang dioperasikan, kerusakan pada sarana dan prasarana seperti jalan dan jembatan. Persoalan tersebut sering diperparah oleh timbulnya korban jiwa dari kalangan penambang maupun masyarakat umum.

¹Wendiyanto Saputro, Penerimaan Negara dari Migas dan Tambang Semester I 2018 Lewati Target, hlm.1, <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/penerimaan-negara-dari-migas-dan-tambang-semester-i-2018-lewati-target-27431110790554337>, diakses 18 Maret 2019.

²Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia No.05 Tahun 2007 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri.

Segala dampak negatif sebagai akibat kegiatan pertambangan, termasuk pertambangan batuan perlu dikontrol melalui perizinan. Dalam hal ini, izin merupakan instrument yuridis untuk mencegah persoalan, termasuk persoalan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pelaku kegiatan pertambangan wajib memiliki izin yang meliputi :

1. Izin Usaha Pertambangan atau disebut IUP
2. Izin Pertambangan Rakyat atau disebut IPR, dan
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus atau disebut IUPK.

Izin tersebut dapat diperoleh pelaku usaha tambang dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang MINERBA yang akan di keluarkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri sesuai dengan kewenangannya, namun dalam prakteknya masih banyak pelaku tambang yang tidak mengindahkan akan hal ini dan mengakibatkan timbulnya persoalan lingkungan karenanya.

Salah satu kabupaten yang mempunyai potensi pertambangan namun juga manghadapi dampak lingkungan ini adalah Kabupaten Klaten. Di Kabupaten Klaten masih banyak ditemukan pelaku usaha tambang yang belum memiliki izin. Menurut Pasal 45 ayat (4) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten No.11 Tahun 2011 Tentang RTRW 2011-2031 seluruh wilayah yang telah ditentukan sebagai kawasan pertambangan batuan di Kabupaten Klaten merupakan wilayah usaha pertambangan. Kegiatan pertambangan tersebut wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota setelah pelaku usaha tambang mengajukan permohonan dan memenuhi seluruh persyaratan. Hanya saja, dalam praktik banyak pelaku kegiatan yang tidak memiliki izin, baik IUP

ataupun IPR. Di samping itu, masih banyak juga dijumpai penambang yang melakukan penambangan dengan menggunakan alat-alat berat, dan hal ini yang dikeluhkan oleh masyarakat sekitar.³ Akibat kurang diperhatikannya masalah tersebut, usaha pertambangan di Kabupaten Klaten menimbulkan kerusakan lingkungan berupa kerusakan jalan dan jembatan akibat kendaraan pengangkut bahan tambang. Kondisi ini menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur lalu lintas kendaraan pengangkut bahan tambang tersebut. Salah satu bentuk kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat persoalan lingkungan tersebut adalah kecelakaan yang kerap memakan korban. Salah satunya adalah kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang pelajar karena roda sepeda motor yang dikendarainya masuk ke jalan yang berlubang akibat kegiatan pertambangan.⁴

Permasalahan lingkungan akibat aktivitas pertambangan melanggar hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, persoalan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan perlu dikendalikan. Dalam hal ini, pelaku usaha, termasuk pelaku kegiatan pertambangan mempunyai kewajiban mencegah pencemaran ataupun

³Ari Susanto, Masyarakat Merapi protes penambangan pasir dengan alat berat, hlm.1, <https://www.rappler.com/indonesia/136428-masyarakat-merapi-protes-penambangan-pasir-dengan-alat-berat>, diakses 14 Februari 2019.

⁴Adib Muttaqin Asfar, Terperosok Lubang Jalan Kemalang-Kebonarum Klaten, Siswa SMK Tewas, hlm.1, <https://soloraya.solopos.com/read/20161026/493/763908/terperosok-lubang-jalan-kemalang-kebonarum-klaten-siswa-smk-tewas>, diakses 16 Februari 2019.

kerusakan lingkungan. Di samping itu, pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), mempunyai tugas dan fungsi untuk mengendalikan dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan, meskipun demikian, persoalan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan masih saja terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulistertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai Akibat Mobilitas Kendaraan Pengangkut Batuan di Kabupaten Klaten”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yangtelah penulis uraikan maka rumusan masalah adalah “Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat mobilitas kendaraan pengangkut batuan di Kabupaten Klaten?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat mobilitas kendaraan pengangkut batuan(studi kasus di Kabupaten Klaten).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan dalam upaya

pengendalian kerusakan lingkungan akibat lalu lintas kendaraan pengangkut batuan di Kabupaten Klaten.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Dinas Lingkungan Dan Kehutanan Kabupaten Klaten dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap persoalan lingkungan akibat mobilitas kendaraan pengangkut batuan.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sebagai syarat kelulusan mendapatkan gelar studi sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ivana Melinda Ohoiulun, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2010 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Rakyat Ilegal Dalam Upaya Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman Yogyakarta”.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat secara ilegal di Kabupaten Sleman?

- 2) Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan secara illegal oleh masyarakat di Kabupaten Sleman?

b. Hasil Penelitian :

- 1) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat akan pentingnya mendapat izin atas pertambangan rakyat yang dilakukan.
- 2) Kurangnya SDM yang menghambat petugas terkait untuk memberikan pengarahan, penjelasan, pembinaan dan pengawasan terkait dengan pertambangan rakyat.
- 3) Pada umumnya pelaku tambang berpikir bahwa mereka melakukan kegiatan di tempat mereka tinggal yang mana dalam persepsi mereka tempat tersebut beserta isi didalamnya adalah sepenuhnya milik mereka dan dalam mengusahakan atau memanfaatkan bahan galian tersebut tidak memerlukan izin dari siapapun.

2. Skripsi yang ditulis oleh Manda Serevina Fransisca Putri Hutagaol, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2014 dengan judul “Peran Kantor Pelayanan Perizinan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pertambangan Rakyat Di Kabupaten Sleman”.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana peran kantor pelayanan perizinan dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan rakyat di Kabupaten Sleman?

- 2) Apakah ada yang menjadi hambatan atau kendala dari kantor pelayanan perizinan dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan rakyat di Kabupaten Sleman.

b. Hasil Penelitian :

- 1) Kantor pelayanan perizinan tidak lagi berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan kegiatan pertambangan rakyat telah dihentikan pasca erupsi gunung merapi tahun 2010. Kegiatan pertambangan rakyat kemudian dilakukan melalui normalisasi daerah aliran sungai dilakukan oleh kantor lingkungan hidup dan dinas sumber daya air energi dan mineral.
- 2) Dalam kegiatan normalisasi daerah aliran sungai pengawasan dilakukan oleh kantor lingkungan hidup dan dinas sumber daya air, energy dan mineral. Pengawasan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut menghadapi kendala, sehingga tidak dapat dilakukan secara optimal. Dalam melakukan pengawasan dinas sumber daya air, energy dan mineral dan kantor lingkungan hidup terkendala pada jumlah personil dan dana yang kurang memadai.
3. Skripsi yang ditulis oleh Agustinus Fransiskus San Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2012 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Sebagai Akibat Pertambangan Rakyat Di Kecamatan Palu Timur Kota Palu”.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan rakyat di Kecamatan Palu Timur Kota Palu?
- 2) Apakah ada kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penegakkan hukum yang diakibatkan oleh pertambangan rakyat di Kecamatan Palu Timur Kota Palu?

b. Hasil Penelitian :

- 1) Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat pertambangan rakyat di Kelurahan Palu Timur Kota Palu belum berjalan dengan baik.
- 2) Penegakan hukum belum dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya hambatan yaitu kurangnya koordinasi yang baik oleh pemerintah daerah, terbatasnya sosialisasi peraturan maupun perundang undangan dari pemerintah daerah, kekhawatiran dari pemerintah daerah, dan ketidak sungguhan dari penegak hukum itu sendiri.

Dari ketiga tulisan di atas berbeda dengan rencana penelitianpenulis dalam hal fokus permasalahannya ataupun lokasi penelitiannya.Tulisanpertama berfokus pada penegakan hukum dan upaya pengendalian kerusakan lingkungan terhadap kegiatan pertambangan rakyat illegal di Kabupaten Sleman.Tulisan kedua berfokus pada peran kantor pelayanan perizinan dalam melakukan

pengawasan terhadap pertambangan rakyat di Kabupaten Sleman. Tulisan ketiga berfokus pada penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup akibat penambangan rakyat di Kecamatan Palu Timur Kota Palu, sedangkan rencana penelitian penulis lebih berfokus pada bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat mobilitas kendaraan pengangkut batuan.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁵

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di bidang lingkungan hidup.⁶

3. Kerusakan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 butir 17 UUMINERBA, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/ atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/peran>, diakses 19 Februari 2019.

⁶Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Kum.1/8/2016.

4. Mobilitas

Menurut KBBI, mobilitas adalah gerakan berpindah-pindah, yang dalam hal ini diartikan sebagai aktifitas perpindahan kendaraan.⁷

5. Kendaraan Pengangkut

Menurut Abdulkadir Muhammad Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.⁸ Dalam hal ini kendaraan pengangkut adalah kendaraan yang digunakan sebagai alat transportasi dalam kegiatan pengangkutan terhadap barang maupun orang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya dan didukung oleh data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah:

⁷KBBI, <https://kbbi.web.id/mobilitas>, diakses 20 September 2019.

⁸Abdulkadir Muhammad, 1991, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, Hlm.19.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Pengumpulan data ini dilakukan melalui komunikasi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya berdasarkan masalah hukum yang diteliti sebagai data utama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan sebagai pelengkap data primer yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- b) Perda Kabupaten Klaten No.11 Tahun 2011 Tentang RTRW 2011-2031.
- c) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten No.8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.
- d) Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata

Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, fakta sosial dan pendapat hukum yang berasal dari buku dan internet yang berkaitan dengan persoalan lingkungan.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan :

1) Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data.⁹ Wawancara tersebut guna memperoleh informasi mengenai perandinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan batuan di Kabupaten Klaten. Sebagai pedoman wawancara, peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya serta menggunakan alat rekam berupa *Handphone* yang dilakukan terhadap narasumber.

⁹Rianto Adi, 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta, Granit, hlm.72.

2) Kuesioner

Kuesioner merupakan proses pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis dengan cara memberikan langsung kepada responden.

- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, internet, dan wawancara.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan ini dilakukan di Kabupaten Klaten.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden

- 1) Kasi AMDAL dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten, Bondan Sidharta PS, S.Hut., M.M.
- 2) Pelaku usaha transportasi pengangkut batuan yang meliputi: Giyanto, Bambang Saputra, Totok, Heribertus, Parto Kepruk, Samsudin, Eko, Marhen Dwi Lestari, Alip, Paiman.

b. Narasumber

- 1) Kasi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, Satya Wijaya, S.T.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif untuk menemukan hubungan variabel-variabel antara data yang telah didapatkan sebagai upaya menemukan jawaban dari rumusan masalah, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode penalaran/ berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari suatu pengetahuan yang tunggal/ khusus untuk menarik suatu kesimpulan dengan pengetahuan yang bersifat umum.